

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Administrasi Keuangan membahas semua kegiatan kegiatan berdasarkan persiapan anggaran akuntabilitas untuk sampai pada tujuan tertentu secara produktif. Prosedur administrasi ialah salah satu kegiatan penting dalam ekonomi keuangan regional. Implementasi fungsi pemerintah daerah diimplementasikan secara optimal jika manajemen keuangan regional dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen keuangan regional adalah seluruh kegiatan dengan perencanaan, penganggaran, implementasi, administrasi, pelaporan, akuntabilitas dan pengawasan keuangan regional sesuai dengan peraturan pemerintah 12 tahun 2019 berkaitan dengan manajemen keuangan regional. Pembiayaan regional adalah semua hak dan kewajiban regional sehubungan dengan organisasi pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua kemakmuran yang terkait dengan hak dan kewajiban wilayah tersebut.

Pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperkenalkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 2011. Secara umum, administrasi dibagi menjadi dua bagian: administrasi penerimaan dan administrasi pengeluaran. Proses pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk diperhatikan baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Lemahnya pengelolaan keuangan daerah dapat mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian internal keuangan daerah yang dapat menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Manajemen keuangan regional tidak lepas dari fungsi perbendaharaan. Salah satu fungsi bendahara adalah pelaksanaan pengeluaran melalui badan pengeluaran. Biaya bendahara adalah penerimaan resmi, penghematan, pembayaran, administrasi, dan asumsi tanggung jawab atas uang negara / regional untuk pengeluaran daerah berdasarkan implementasi APBD di unit kerja regional (SKPD). Bendahara Biaya harus mengelola uang dan bertanggung jawab atas pengeluaran regional pada implementasi APBD. Kementerian Kehakiman untuk menyelesaikan kegiatan wajib pajak harta karun Perbendaharaan dalam Manajemen Keuangan, yang dilakukan oleh pemerintah, harus dilakukan oleh Administrasi Keuangan, yang secara sistematis ditolak dalam pembiayaan berdasarkan prosedur tertentu.

Ruang lingkup administrasi Bendahara Delegasi Beban meliputi pengujian pengeluaran dana (SPD), panggilan untuk pembayaran (SPP), uang beredar (UP), dana pengganti (JP), dana tambahan (JP) dan langsung (LS) Keduanya. SPLS Remunerasi dan tunjangan dan SPLS barang dan jasa, serta penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM), Penarikan Dana (SP2D) dan tanggung jawab penggunaan dana.

Salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SP2D) yang berfungsi sebagai dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah. Mengingat pentingnya prosedur pelepasan SP2D yang harus diikuti oleh semua pihak, baik SKPD maupun PPKD, maka penulis tertarik memilih judul **“Prosedur Penatausahaan**

## **Bendahara Pengeluaran Dalam Penerbitan SP2D Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yaitu:

1. Bagaimana proses penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran dalam penerbitan SP2D di (BPKAD) Kota Padang?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran di (BPKAD) Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana prosedur Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran dalam penerbitan SP2D di BPKAD Kota Padang.
2. Untuk mengkaji Apa saja dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran di BPKAD Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang tata cara administrasi bendahara pengeluaran pada saat menerbitkan SP2D di BPKAD Kota Padang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah, penulis mensistematisasikan penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup konteks masalah, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan magang, keuntungan magang, lokasi dan durasi magang, dan struktur penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang gambaran umum penyelenggaraan, keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, keuangan bendahara daerah, dan kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini mencakup gambaran umum pelaksanaan, keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, keuangan perbendaharaan daerah, dan kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang bagaimana prosedur administrasi bendahara berlaku saat menerbitkan SP2D dan dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur administrasi bendahara pengeluaran di Kantor Bendahara dan Pengelolaan Aset Kota Padang.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis.